



The Effect of Participation in Budgeting, Utilization of Information Technology, and Budget Revision on the Effectiveness of Surabaya Government OPD Budget Management

Dinda Fitriandini ^{1*},

Tituk Diah Widjantie ²,

^{1,2} Faculty of Economics and Business, Accounting Department, UPN "Veteran" East Java, Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>ISSN: 2774-4256</p> <p>Keywords:</p> <p><i>Participation in Budgeting, Utilization of Information Technology, Budget Revision, Effectiveness of Budget Management.</i></p>	<p><i>This study aims to examine (1) the effect of budgetary participation on budget effectiveness, (2) the effect of the use of information technology on the effectiveness of budget management, (3) the effect of budget revisions on the effectiveness of budget management. The endogenous variable used is the effectiveness of budget management. This study used a sample of Surabaya City Regional Apparatus Organizations, namely 21 Surabaya City Offices. The method used to collect data was purposive sampling method, by distributing questionnaires. Data analysis techniques used Partial Least Square (PLS) with SmartPLS 3.0 software. The results of this study indicate that (1) budget participation has an effect on the effectiveness of budget management, (2) the use of information technology has no effect on the effectiveness of budget management, (3) budget revision has an effect on the effectiveness of budget management.</i></p>

Pendahuluan

Acuan Pemerintah Kota Surabaya dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang merupakan perubahan kedua kali dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut bertujuan agar setiap instansi pemerintah dapat mengelola anggarannya secara efektif.

Efektivitas dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan atau indikator kebijakan. Efektivitas adalah perbandingan antara tujuan dan hasil yang dicapai. Semakin dekat tujuan dengan hasil yang dicapai, semakin efektif rencana tersebut. (Mardiasmo, 2017:134). Untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam realisasi anggaran belanja yang direncanakan yaitu dengan rasio efektivitas, dengan cara membandingkan anggaran belanja yang direncanakan tersebut dengan sasaran yang ingin dicapai. Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi anggaran Kota Surabaya tahun 2014-2018 belum dapat dikatakan efektif karena pencapaiannya kurang dari 90%.

**Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Surabaya
Periode 2014-2018**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2014	7.072.715.425.304,00	5.707.378.466.054,09	80,70	Cukup Efektif
2015	7.928.337.395.393,00	6.490.359.759.532,00	81,86	Cukup Efektif
2016	8.115.231.350.395,00	7.151.661.549.430,48	88,13	Cukup Efektif
2017	8.963.930.686.060,00	7.912.409.152.257,09	88,27	Cukup Efektif
2018	9.268.450.333.673,00	8.176.929.496.298,63	88,22	Cukup Efektif

Sumber: www.surabaya.go.id (Data diolah, 2020)

Partisipasi penyusunan anggaran dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran. Oleh karena itu proses penyusunan anggaran merupakan bagian yang terpenting. Partisipan dalam penyusunan anggaran akan bertanggung jawab secara penuh dan terlibat secara langsung atas tugas-tugas yang diberikan. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Surabaya menyusun anggaran sesuai dengan indikator kinerja mulai dari program yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun masih terjadi ketidaktepatan sasaran anggaran yang tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan sehingga berdampak pada tidak efektifnya pengelolaan anggaran organisasi perangkat daerah. Hasil penelitian Sulistyono (2016) menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian keuangan.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi memegang peran penting karena informasi akan menjadi optimal, proses transaksi yang dilakukan akan meningkat, akurat dalam perhitungan dan data lebih tepat, tidak memerlukan biaya yang tinggi, penyiapan laporan lebih tepat waktu, serta tempat yang diperlukan lebih ringkas (Wilkinson et al., 2000). Menurut Suradji (2018) teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data yang dimulai dari memperoleh lalu dikumpulkan dan disimpan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, akurat dan dapat digunakan individu, bisnis maupun pemerintah sehingga pengambilan keputusan berlangsung dengan baik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk dapat mengembangkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi agar dalam mengelola anggaran dan laporan keuangan menjadi efektif sehingga dapat menyampaikan informasi kepada publik dengan cepat, tepat waktu, dan berkualitas. Penelitian Sukarta et al (2017) menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Akan tetapi dalam penelitian Setyowati et al (2016) menunjukkan bahwa peran teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Revisi anggaran adalah hal yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020, menyatakan bahwa revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2020 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020. Terdapat indikasi pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Surabaya belum dapat dikatakan efektif yaitu Pemerintah Kota Surabaya mengalami defisit pada Tahun Anggaran 2014-2018 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2003). Jumlah belanja lebih besar daripada pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara anggaran yang telah disusun dengan realisasinya yang berdampak pada ketidakefektifan anggaran. Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan revisi anggaran agar tujuan dapat tercapai dan anggaran menjadi tepat sasaran sehingga terciptanya anggaran yang efektif. Pada penelitian Sukarta et al (2017) menunjukkan bahwa revisi anggaran berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.

Landasan Teori

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan suatu kontrak di mana terdapat *principal* dan *agent*. *Principal* (atasan) terdiri dari satu atau beberapa orang memberikan perintah kepada *agent* (bawahan) untuk melakukan tugas dan *agent* diberikan wewenang untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal* (Jensen dan Meckling, 1976). Hidayati et al., (2015) menjelaskan konsep *corporate governance* dalam teori keagenan yaitu hubungan kontraktual antara *principal* (Kepala SKPD) yang memberikan wewenang kepada *agent* (Kabid/Kasubag) pejabat struktural di bawah Kepala SKPD. Pihak *agent* yang melakukan tugas yang diberikan dalam pengelolaan anggaran harus mempertanggungjawabkan segala aktivitas kepada pihak *principal* yang memberi mandat. Fenomena lainnya yaitu Pengelola anggaran/pengawas keuangan (*agent*) yang melakukan pengelolaan anggaran melaporkan anggaran pada tahun berkenaan tersebut diharapkan sama dengan kinerja yang dilaksanakan, namun pihak *agent* tersebut cenderung lebih mengetahui informasi yang ada daripada *principal* sehingga bawahan dapat memanfaatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam anggaran di dalam OPD.

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* menurut Donaldson dan Davis (1991), menjelaskan bahwa manajer termotivasi oleh tujuan untuk kepentingan organisasi, bukan oleh tujuan individu. Eksekutif yang merupakan *steward* mendapatkan motivasi bertindak sesuai dengan *principal*, dan *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya sehingga tidak akan meninggalkan organisasi. Pemerintah Daerah diharuskan untuk mengelola

anggaran nya secara efektif dan relevan untuk dilaporkan kepada publik/ masyarakat sebagai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Laporan Realisasi Anggaran yang dihasilkan digunakan sebagai pengambilan keputusan dan dasar untuk menyusun anggaran tahun anggaran berikutnya. Peran akuntansi pada organisasi sektor publik khususnya pemerintahan sangat diperlukan untuk mengelola kekayaan negara. Implikasi teori *stewardship* pada penelitian ini menjelaskan *steward* yaitu pemerintah daerah sebagaimana tugasnya untuk melayani masyarakat dan mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran pemerintah yang telah disusun dan dilaksanakan. Sehingga tujuan ekonomi negara dapat tercapai untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah daerah sebagaimana tugasnya untuk melayani masyarakat dan lembaga yang menjadi

Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Mardiasmo (2017) mengungkapkan bahwa efektivitas merupakan anggaran yang digunakan untuk kepentingan publik sesuai dengan target yang akan dicapai. Suatu organisasi dapat dikatakan efektif jika suatu layanan telah mencapai target yang ditentukan dan dibandingkan dengan outcome dengan output. Dan pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Untuk menilai efektivitas pengelolaan anggaran OPD, terdapat beberapa indikator diantaranya, 1) penyelesaian tepat waktu, yaitu memenuhi jadwal penyelesaian tugas yang ditentukan, 2) penyelesaian kegiatan sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia, yang mana artinya total pengeluaran didasarkan pada jumlah yang dianggarkan atau kegiatan yang telah ditentukan, 3) mencapai tujuan sesuai rencana, artinya menggunakan pengeluaran secara ekonomis, tidak boros, efektif dan efisien (Pradita, 2010 dalam Fadri et al 2015).

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Konsep partisipasi anggaran adalah bagaimana pengaruh manajer dalam menentukan target anggaran yang akan dicapai di pusat pertanggungjawabannya dan seberapa jauh partisipasi mereka dalam mempersiapkan anggaran Kenis (1979) dalam (Hidayati et al., 2015).

Partisipasi anggaran dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran sehingga keputusan yang dihasilkan sangat baik dan berkualitas (Sabas, 2011 dalam Hidayati et al., 2015). Anggaran dikatakan efektif apabila tujuan yang ditentukan dapat dicapai. Anggaran yang tidak efektif dapat menyebabkan banyak hal, yaitu anggaran yang telah ditetapkan menjadi tidak tepat sasaran dan rencana yang disusun menjadi gagal. Oleh karena itu, proses penyusunan anggaran merupakan bagian yang terpenting. Partisipasi penyusunan anggaran yang dijalankan oleh partisipan instansi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran yang lebih baik dari yang telah dikelola sebelumnya, serta konflik yang ada mengenai tujuan individu dengan tujuan

instansi dapat diminimalisir (Handrika, 2017). Dalam penelitian Sulistyو (2016) menemukan hasil bahwa Penganggaran Partisipatif berpengaruh terhadap Efektivitas Pengendalian Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pada era saat ini, lembaga pemerintahan menggunakan teknologi informasi berupa komputer dalam mengolah data. Terdapat beberapa tugas-tugas yang mengharuskan cepat yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia sehingga komputer dapat memudahkan pengerjaan tugas dan meningkatkan efektivitas (Jogiyanto, 2010). Pemanfaatan teknologi informasi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Informasi yang disampaikan dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sukarta et al (2017) menemukan hasil Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran.

Revisi Anggaran

Pemerintah akan merevisi anggaran untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pemerintah tahun anggaran berkenaan, serta mempercepat pencapaian kinerja berbagai kementerian/ lembaga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran. Karena kemungkinan kebutuhan anggaran yang telah disusun satu tahun sebelumnya belum mencukupi untuk tahun yang direncanakan (Sukarta et al., 2017). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 menyebutkan bahwa revisi anggaran merupakan perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2020 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020. Penelitian tentang pengaruh revisi anggaran terhadap efektivitas pengelolaan anggaran telah dilakukan Sukarta et al (2017), hasilnya menunjukkan bahwa Revisi Anggaran berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran.

Metode Penelitian

Populasi yang digunakan yaitu Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya berjumlah 72 OPD yang terdiri dari Sekretariat, Badan, Bagian, Dinas, dan Kecamatan yang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:85). Penggunaan *purposive sampling* dikarenakan peneliti telah menentukan kriteria yang sesuai. Kriteria untuk pengambilan sampel dari penelitian ini, yaitu:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya yang terdaftar pada www.surabaya.go.id.

2. Memiliki jabatan sebagai Kepala OPD, Kepala Bagian Anggaran, dan Staf Bagian Anggaran.
3. Memiliki masa kerja selama 1 tahun lebih pada OPD Kota Surabaya.

Kriteria yang diambil pada penelitian ini dengan pertimbangan tertentu dianggap sebagai orang yang paling menguasai dan mengerti tentang yang menjadi objek atau tinjauan penelitian. Berdasarkan kriteria yang disebutkan, sampel dalam penelitian ini yaitu 21 Dinas OPD Pemerintah Kota Surabaya. Responden berjumlah 84 orang.

Variabel eksogen dan endogen. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah Efektivitas Pengelolaan Anggaran. Sedangkan variabel eksogen terdiri dari Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Revisi Anggaran. Teknik pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah skala *likert*, digunakan untuk mengukur pendapat dan persepsi dari responden penelitian yang telah disebarkan.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, dengan menyebarkan kuisisioner yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya. Metode pengumpulan data menggunakan metode penelitian survei, dengan menyebarkan kuisisioner kepada responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini *Partial Least Square* (PLS) dengan software SmartPLS 3.0.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini menyebarkan 84 kuisisioner pada OPD Pemerintah Kota Surabaya yang berjumlah 21 Dinas. Kuisisioner diedarkan dari tanggal 29 Januari – 19 Februari 2021. Total kuisisioner yang disebarkan berjumlah 84 kuisisioner, sebanyak 68 kuisisioner diterima kembali dan dapat diolah.

Uji Validitas Convergent

Model pengukuran *convergent validity* dapat dilihat pada loading factor, yaitu sebuah nilai yang dihasilkan oleh setiap indikator untuk mengukur variabelnya. Batasan nilai yang diterima dan dikatakan valid lebih besar dari 0,70. Pada tahap satu terdapat beberapa hasil yang berwarna merah menunjukkan hasil di bawah 0,70 tidak memenuhi kriteria batas minimal. Sehingga dilakukan mengeliminasi indikator yang nilai *loading factor* di bawah 0,70. Pada tahap dua telah dilakukan mengeliminasi indikator yang bernilai di bawah 0,70 atau batas minimal terdiri dari indikator PPA3, PPA6, RA1, EPA5. Sehingga nilai *loading factor* pada tabel tersebut valid dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel sudah cukup optimal. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) semua konstruk lebih dari 0,50.

Tabel 3 Outer Loading

	Partisipasi Penyusunan Anggaran	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Revisi Anggaran	Efektivitas Pengelolaan Anggaran	AVE
PPA1	0.897				0,769
PPA2	0.824				
PPA4	0.906				
PPA5	0.877				
PTI1		0.758			
PTI2		0.854			0,684
PTI3		0.848			
PTI4		0.801			
PTI5		0.867			
RA2			0.802		
RA3			0.810		0,714
RA4			0.888		
RA5			0.875		
EPA1				0.866	
EPA2				0.708	0,652
EPA3				0.750	
EPA4				0.893	

Sumber: Data diolah (2021)

Uji Validitas Discriminant

Berdasarkan tabel 4 nilai *cross loading* yang didapat atas pengujian tersebut menunjukkan bahwa semua indikator yang membentuk variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Revisi Anggaran, dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran memiliki nilai *cross loading* terbesar untuk variabel dibentuknya.

Tabel 4 Cross Loading

	Partisipasi Penyusunan Anggaran	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Revisi Anggaran	Efektivitas Pengelolaan Anggaran
PPA1	0.897	0.065	0.400	0.494
PPA2	0.824	0.098	0.370	0.598
PPA4	0.906	0.242	0.298	0.567
PPA5	0.877	0.335	0.359	0.474
PTI1	0.219	0.758	0.321	0.346
PTI2	0.211	0.854	0.587	0.451
PTI3	0.097	0.848	0.529	0.406
PTI4	0.094	0.801	0.499	0.321
PTI5	0.220	0.867	0.421	0.470
RA2	0.310	0.340	0.802	0.486

	Partisipasi Penyusunan Anggaran	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Revisi Anggaran	Efektivitas Pengelolaan Anggaran
RA3	0.241	0.428	0.810	0.527
RA4	0.425	0.606	0.888	0.727
RA5	0.364	0.504	0.875	0.568
EPA1	0.588	0.410	0.708	0.866
EPA2	0.374	0.201	0.451	0.708
EPA3	0.509	0.376	0.503	0.750
EPA4	0.488	0.542	0.604	0.893

Sumber: Data diolah (2021)

Uji Reliabilitas

Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas jika nilai *cronbach's alpha* di atas 0,60 dan nilai *composite reliability* di atas 0,70. Dari hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa semua konstruk memiliki nilai *cronbach's alpha* di atas 0,60 dan nilai *composite reliability* di atas 0,70, sehingga dapat dikatakan semua konstruk memenuhi kriteria reliabel.

Tabel 5 Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Partisipasi Penyusunan Anggaran	0.930	0.900
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.915	0.884
Revisi Anggaran	0.909	0.867
Efektivitas Pengelolaan Anggaran	0.881	0.820

Sumber: Data diolah (2021)

Uji R Square

Pada tabel 7 structural model menunjukkan nilai R Square 0,650 yang berarti konstruk Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Revisi Anggaran interaksinya sebesar 65% dan 35% sisanya dijelaskan oleh variabel selain variabel dalam penelitian ini.

Tabel 7 R Square

	R Square	R Square Adjusted
--	----------	----------------------

Efektivitas Pengelolaan Anggaran	0.650	0.633
----------------------------------	-------	-------

Sumber: Data diolah (2021)

Uji T-statistik

Pada tabel 6 menunjukkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran dan revisi anggaran terhadap efektivitas pengelolaan anggaran memiliki t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel yaitu $> 1,96$. Kemudian pada variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai t-statistik kurang dari nilai t-tabel. Variabel partisipasi penyusunan anggaran dan revisi anggaran memiliki P Value kurang dari 0,05. Sedangkan variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki P Value lebih dari 0,05.

Tabel 6 T-statistics dan P Value

	T-Statistics ($\frac{t}{STDEV}$)	P Values
PPA -> EPA	5.585	0.000
PTI -> EPA	1.480	0.139
RA -> EPA	4.347	0.000

Sumber: Data diolah (2021)

PEMBAHASAN

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan hasil uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sulistyono (2016). Efektivitas pengelolaan anggaran dapat tercapai salah satu faktornya yaitu pegawai yang berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Bawahan dapat mengkomunikasikan kebutuhan yang dibutuhkan kepada atasan serta bawahan dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil. Semakin banyak partisipasi pegawai dalam penyusunan anggaran maka dapat meningkatkan efektivitas anggaran OPD.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan hasil uji hipotesis 2 menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya. Hal ini sejalan dengan penelitian Mantiri et al (2018). Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dapat disimpulkan bahwa meningkatnya teknologi informasi

yang digunakan dan yang tersedia tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Hal ini terjadi karena salah satu penyebabnya yaitu dalam proses penyusunan anggaran menggunakan teknologi informasi tidak menutup kemungkinan dapat terjadi salah input sehingga menjadi tidak tepat sasaran dan mengakibatkan tidak efektif dalam pengelolaan anggaran.

Pengaruh Revisi Anggaran Terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan hasil uji hipotesis 3 menunjukkan bahwa Revisi Anggaran berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sukarta et al (2017). Rincian anggaran belanja dan pendapatan yang telah disusun tidak menutup kemungkinan terjadi salah saji, kebutuhan untuk tahun yang dianggarkan belum tercakup di dalamnya, adanya perubahan prioritas selama tahun anggaran, terjadi perubahan kebijakan dan metodologi dalam melaksanakan kegiatan, adanya kesalahan prediksi untuk jumlah penerimaan anggaran. Sehingga pemerintah melakukan revisi anggaran (peningkatan kualitas anggaran) agar terciptanya anggaran yang efektif.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan revisi anggaran berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Semakin banyak pegawai yang diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam penyusunan anggaran maka semakin tinggi pula efektivitas pengelolaan anggaran yang dicapai dan juga dalam melakukan revisi anggaran. Akan tetapi pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Hal ini menunjukkan meningkatnya teknologi informasi yang digunakan dan yang tersedia tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang terkait dengan efektivitas pengelolaan anggaran. Bagi Pemerintah (1) Menjadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam partisipasi penyusunan anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, dan revisi anggaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, (1) Memperluas jumlah sampel dan responden untuk penelitian selanjutnya dan menggunakan metode penelitian yang berbeda, (2) Menambah variabel-variabel yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran selain variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

Abdillah, W., dan J. Hartono. 2015. *Partial Least Square (PLS)*. Yogyakarta: Andi.

Abdillah dan Jogiyanto. 2011. *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modelling (SEM)*. Yogyakarta: Andi.

- Amaliawati, Riska. 2015. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Universitas Widyatama. Bandung.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Bay, Pricilia Grace. 2019. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah KotaKupang). *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas* 7(2):138-147. Universitas Nusa Cendana.
- Donaldson, L. dan Davis, J.H. 1991. *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. *Australian Journal of Management*.
- Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modeling – Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gunawan, Dimas R. 2016. Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Akuntansi* 8(1):72-102. Universitas Surabaya. Surabaya.
- Handrika, D., dan Made Gede W. 2017. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Kinerja Manajerial Yang Dimoderasi *Self Efficacy* dan Motivasi Kerja. *E Jurnal Akuntansi* 20(2):875-903. Universitas Udayana.
- Hidayati, S., Basuki P., dan Pancawati S. 2015. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Pemahaman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, dan Asimetri Informasi Terhadap Efektivitas Anggaran SKPD di Pemerintah Kota Mataram. *Jurnal InFestasi* 1(11):93-111. Universitas Mataram. Nusa Tenggara Barat.
- Iskandar, Joni. 2015. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *JOM Fekon* 2(2):1 15. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Jensen, M., dan W. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial behaviour, agency cost and ownership structure. *Journal of Finance Economic* 3:305 360.
- Jogiyanto. 2010. *Sistem Teknologi Informasi*. Edisi 3. Yogyakarta: Andi.
- Kusumah, R. Wiriahadi. 2015. Pengaruh Anggaran Partisipatif dan Komitmen Manajer Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Universitas Widyatama. Bandung.
- Malahayati, C., Islahudin, dan Hasan B. 2015. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap

- Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana* 4(1):11-19. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Mantiri, R., V.A. Rimate, dan George M. V.K. 2018. Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Pegawai, dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Anggaran Pada Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 19(7). Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. 2010. *Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas H. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Kota Surabaya. 2019. Organisasi Perangkat Daerah (OPD). www.surabaya.go.id. 31 Oktober 2020 (07.09).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2020 *Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020*. 20 April 2020. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 383. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- _____ Nomor 15 Tahun 2016 *Tata Cara Revisi Anggaran*. Jakarta.
- _____ Nomor 65 Tahun 2010 *Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Priyatna, Latif. 2016. Pengaruh Perencanaan dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya.
- Riyanti, Y., Nadirsyah, dan Heru Fahlevi. 2015. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Peran Internal Audit Pada Satuan Kerja Perangkat Mahkamah Syar'iyah di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi* 4(2):80-90. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Setyowati, L., W. Isthika, dan R. D. Pratiwi. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Kinerja* 20(2): 179-191. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.

- Simatupang, Mei Sari. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *JOM Fekon* 4(1):411-425. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta.
- Sukarta, I W., Badera, I. D.N., dan Ratnadi, N.M.D. 2017. Pengaruh Kompeten Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen dan Revisi Anggaran Pada Efektivitas Pengelolaan Anggaran Universitas Udayana. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 6(11):3917-3950. Universitas Udayana.
- Sulistyo, Ahmad Iwan. 2016. Pengaruh Penganggaran Partisipatif Terhadap Efektivitas Pengendalian Pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Universitas Jember.
- Suradji, M. 2018. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Bidang Kesiswaan, Kepegawaian dan Keuangan di SMA Muhammadiyah 1 Gresik. *Jurnal Studi Pendidikan Islam* 1(2). Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan. Lamongan.
- Taviana, Thifal. 2020. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Surabaya.
- Yanti, F., Basri H., dan Arfan M. 2015. Pengaruh Pemahaman Atas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Pengawas Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Aceh di Pemerintah Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana* 4(4):1-10. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Yaswat, Latifatul. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *JOM Fekon* 2(2):2-14. Universitas Riau. Pekanbaru.